

ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN KONTRASEPSI MANTAP INDONESIA (PKMI)

MUKADIMAH

Bahwa dalam usaha mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka Kesehatan, Kebahagiaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat merupakan unsur yang mutlak;

Bahwa keluarga merupakan sendi dasar masyarakat; maka kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga merupakan masalah yang utama bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat pada umumnya;

Bahwa setiap warga berhak dan berkewajiban meningkatkan kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;

Bahwa salah satu usaha untuk mencapai keluarga yang sehat bahagia dan sejahtera ialah melalui keluarga kecil;

Bahwa salah satu cara yang efektif untuk melestarikan keluarga kecil ialah melalui kontrasepsi mantap;

Bahwa demi terwujudnya keluarga yang sehat bahagia dan sejahtera itu maka dibentuklah Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

- Pasal 1 : Perkumpulan bernama Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia disingkat PKMI (dahulu PUSSI); selanjutnya dapat disebut Perkumpulan.
- Pasal 2 : Perkumpulan berkedudukan di Jakarta.
- Pasal 3 : Perkumpulan didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 1974 untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

KETENTUAN

- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan kontrasepsi mantap ialah suatu tindakan untuk membatasi keturunan dalam jangka waktu yang tidak terbatas atas permintaan suatu pasangan suami-isteri secara sukarela.

BAB III

AZAS

- Pasal 5 : PKMI berazaskan Pancasila.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6 : PKMI adalah perkumpulan sosial, yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga melalui kontrasepsi mantap, tanpa mencari keuntungan materi.

BAB V UPAYA

Pasal 7 : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PKMI melakukan upaya sebagai berikut :

1. Memberikan penerangan_seluas-luasnya tentang kontrasepsi mantap.
2. Memberikan pelayanan kontrasepsi mantap.
3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam teknik kontrasepsi mantap.
4. Mengadakan penelitian mengenai segala aspek kontrasepsi mantap.
5. Mengadakan dan membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan organisasi masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Melakukan upaya koordinasi sejauh mungkin dalam bidang kegiatan kontrasepsi mantap.
7. Melakukan upaya lain untuk mencapai maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan azas dan dasar PKMI.

BAB VI ORGANISASI

- Pasal 8 : 1. Organisasi terdiri dari Pusat dan Cabang.
2. Pusat meliputi wilayah seluruh Indonesia dan Cabang meliputi wilayah satu propinsi.
 3. Cabang berkedudukan di ibukota propinsi dan nama cabang disesuaikan dengan nama propinsi.
 4. Cabang dapat didirikan bila sekurang-kurangnya ada 15 orang anggota.
 5. Pendirian cabang harus dengan persetujuan Pengurus Pusat dan pengesahannya oleh Muktamar.

Pasal 9 : 1. Susunan organisasi pada tingkat Pusat terdiri dari :

- a. Muktamar
 - b. Pengurus
 - c. Dewan Penyantun
 - d. Rapat Kerja Tahunan
2. Susunan organisasi pada tingkat Cabang terdiri dari:
- a. Rapat Anggota Cabang
 - b. Pengurus Cabang

BAB VII KEANGGOTAAN

- Pasal 10 : 1. Anggota biasa
2. Anggota luar biasa
3. Anggota kehormatan
- Pasal 11 : 1. Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang sudah menikah atau yang sudah berumur 21 tahun, yang menyetujui serta mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKMI.
2. Anggota luar biasa adalah :
- a. Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawan PKMI.
 - b. Organisasi-organisasi sosial, Badan-badan Hukum atau sejenisnya yang menyetujui serta bersedia mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKMI.
3. Anggota kehormatan adalah mereka yang diangkat karena jasa-jasanya yang luar biasa kepada PKMI.
- Pasal 12 : 1. Anggota biasa dan anggota luar biasa dapat memperoleh keanggotaannya dengan jalan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus.
2. Bila belum ada Cabang PKMI di suatu tempat, pendaftaran dapat dilakukan kepada Pengurus Cabang terdekat.
3. Pengunduran diri sebagai anggota hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Cabang setempat atau bila belum ada, kepada Pengurus Cabang terdekat dengan tembusan kepada Pengurus Pusat.
- Pasal 13 : Keanggotaan berakhir apabila yang bersangkutan :
- 1. Meninggal dunia
 - 2. Mengundurkan diri
 - 3. Diberhentikan
 - 4. Berhenti sebagai karyawan PKMI
- Pasal 14 : Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan atas usul Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang diteliti oleh Dewan Penyantun dan disahkan oleh Muktamar.
- Pasal 15 : 1. Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih.

2. Anggota luar biasa mempunyai hak suara tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
3. Anggota kehormatan mempunyai hak mengajukan saran-saran kepada Pengurus Pusat dan atau Pengurus Cabang.

BAB VIII PIMPINAN PERKUMPULAN

Pasal 16 : Pimpinan Perkumpulan adalah Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.

Pasal 17 : Pengurus Pusat

1. Pimpinan Perkumpulan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat yang dipilih oleh Muktamar, untuk masa jabatan antar dua Muktamar.
2. Pengurus Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Ketua Terpilih merangkap Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
3. Pengurus Pusat membentuk Panitia Tetap, Badan-badan Usaha dan pelengkap lainnya menurut keperluan.
4. Pengurus Pusat bertanggung-jawab kepada Muktamar.
5. Ketua Pengurus Pusat mewakili Perkumpulan di luar dan di dalam Pengadilan.

Pasal 18 : Pengurus Cabang

1. Pimpinan Cabang Perkumpulan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang yang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama hanya untuk satu masa jabatan saja.
2. Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
3. Pengurus Cabang dapat membentuk Panitia-panitia dan Pelengkap lainnya menurut keperluan.
4. Pusdiklitbang adalah pelengkap organisasi yang dibentuk di tingkat Cabang.
5. Pembentukan Pusdiklitbang harus dengan persetujuan Pengurus Pusat.
6. Pusdiklitbang dipimpin oleh seorang Direktur yang dipilih oleh dan bertanggung-jawab kepada Pengurus Cabang.
7. Perwakilan Cabang adalah pelengkap organisasi yang dapat dibentuk di

Daerah Tingkat II apabila diperlukan.

8. Perwakilan Cabang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Pengurus Cabang.
9. Tugas Perwakilan Cabang membantu menyelenggarakan tugas-tugas Pengurus Cabang di daerahnya.
10. Pengurus Cabang bertanggung-jawab kepada Rapat Anggota Cabang dan Pengurus Pusat.

BAB IX PERSIDANGAN PERKUMPULAN

Pasal 19 : Persidangan Perkumpulan terdiri dari Muktamar, Rapat Kerja Tahunan, Rapat Pengurus Pusat dan Rapat Anggota Cabang.

Pasal 20 : Muktamar

1. Muktamar merupakan badan kekuasaan tertinggi Perkumpulan.
2. Muktamar merupakan Musyawarah Anggota Perkumpulan yang diwakili oleh Pengurus Cabang dengan mengikutsertakan Pengurus Pusat dan Dewan Penyantun.
3. Muktamar menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Pedoman Kerja untuk dilaksanakan Pengurus Pusat, memilih Pengurus Pusat dan Dewan Penyantun untuk masa kerja yang akan datang, serta memintakan pertanggung jawaban Pengurus Pusat dan Dewan Penyantun untuk masa kerja yang lalu.
4. Pertanggungjawaban Pengurus Pusat mencakup kegiatan Cabang yang telah dilaporkan ke Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu bulan sebelum Muktamar.
5. Muktamar dilaksanakan tiga tahun sekali oleh Pengurus Pusat.
6. Muktamar dipimpin oleh Ketua dan seorang Sekretaris Muktamar yang dipilih dari dan oleh peserta.
7. Muktamar dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Cabang.
8. Tiap Cabang mempunyai satu suara.
9. Keputusan Muktamar diambil secara musyawarah untuk mufakat.
10. Apabila tidak tercapai mufakat maka diambil pemungutan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh suara yang hadir.

11. Apabila kuorum tidak tercapai, penyelenggaraan Mukhtamar ditunda selama waktu tertentu dan Mukhtamar dianggap sah meskipun tidak mencapai kuorum.
12. Mukhtamar Luar Biasa dapat diadakan atas usul Pengurus Pusat atau atas usul sekurang-kurangnya lebih dari dua pertiga jumlah cabang.

Pasal 21 : Rapat Kerja Tahunan

1. Rapat Kerja Tahunan adalah rapat antar Pengurus Pusat, Dewan Penyangkut dan utusan Cabang, diselenggarakan setahun sekali dalam waktu antar dua Mukhtamar.
2. Rapat Kerja Tahunan merupakan rapat untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program kerja hasil Mukhtamar untuk kurun waktu yang bersangkutan.
3. Rapat Kerja Tahunan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah cabang.
4. Apabila kuorum tidak tercapai maka Rapat Kerja Tahunan ditunda untuk waktu tertentu dan selanjutnya dianggap sah meskipun kuorum tidak terpenuhi.
5. Rapat Kerja Tahunan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
6. Keputusan Rapat Kerja Tahunan dibuat secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 22 : Rapat Anggota Cabang

1. Rapat Anggota Cabang merupakan musyawarah tertinggi Cabang yang bersangkutan yang diadakan sekali dalam tiga tahun.
2. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota.
3. Apabila kuorum tidak tercapai Rapat ditunda untuk waktu tertentu dan seterusnya dianggap sah meskipun tidak tercapai kuorum.
4. Rapat Anggota Cabang dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta.
5. Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X DEWAN PENYANTUN

- Pasal 23 : Dewan Penyantun mendampingi Pengurus Pusat dalam pembinaan Perkumpulan, memberi nasehat diminta atau tidak diminta, serta bertanggung-jawab kepada Mukhtamar.
- Pasal 24 : Dewan Penyantun terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- Pasal 25 : Tata laksana selanjutnya mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI KEKAYAAN

- Pasal 26 : Kekayaan diperoleh dari :
1. Uang pangkal
 2. Uang iuran
 3. Sumbangan yang tidak mengikat
 4. Hasil dari badan usaha milik perkumpulan serta usaha lainnya yang sah yang tidak bertentangan dengan azas, dasar, maksud dan tujuan Perkumpulan.
- Pasal 27 : 1. Pendapatan dan pengeluaran Perkumpulan yang diatur oleh Pengurus Pusat dipertanggungjawabkan kepada Mukhtamar.
2. Pendapatan dan pengeluaran Perkumpulan yang diatur oleh Pengurus Cabang dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota Cabang.
3. Pemeriksaan kekayaan Pusat dan Cabang dilakukan oleh Akuntan Publik atas petunjuk Pengurus Pusat dan dilaporkan Pengurus Cabang ke Pengurus Pusat, yang selanjutnya Pengurus Pusat ke Mukhtamar.

BAB XII ATRIBUT DAN LAMBANG

- Pasal 28 : 1. Atribut dan Lambang Perkumpulan ditentukan oleh Mukhtamar.
2. Atribut dan Lambang Perkumpulan hanya dipakai untuk kegiatan atau program yang ada hubungannya dengan perkumpulan.

BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- Pasal 29 : 1. Usul Perubahan Anggaran Dasar diajukan 6 (enam) bulan sebelum Mukhtamar oleh pengurus Pusat yang telah dibahas dalam Rapat Kerja Tahunan.

2. Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara yang hadir.

BAB XIV PEMBUBARAN

- Pasal 30 :
1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Mukhtamar yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah cabang.
 2. Keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka ditentukan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara yang hadir.
 3. Mukhtamar tersebut mengambil keputusan pula mengenai :
 - a. Kekayaan dan kewajiban-kewajiban Perkumpulan.
 - b. Jika ada sisa kekayaan harus diserahkan kepada organisasi atau badan sosial yang ditunjuk oleh Mukhtamar.

BAB XV PERATURANTAMBAHAN

- Pasal 31 :
1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur oleh Pengurus Pusat dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk dipertanggungjawabkan kepada Mukhtamar.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN KONTRASEPSI MANTAP INDONESIA (PKMI)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

- Pasal 1 : Anggota berkewajiban :
1. Mentaati AD/ART Perkumpulan dan keputusan-keputusan Perkumpulan.
 2. Membayar uang pangkal dan iuran secara teratur kepada Pengurus Cabang.
 3. Berpartisipasi dalam kegiatan Perkumpulan.
 4. Menjaga nama baik Perkumpulan.
- Pasal 2 : 1. Anggota dapat diberhentikan bilamana :
- a. Melanggar AD/ART atau keputusan-keputusan Perkumpulan.
 - b. Merugikan atau mencemarkan nama baik Perkumpulan.
2. Dalam hal-hal tersebut di atas anggota yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Cabang.
3. Setelah anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri pada waktu Rapat Anggota Cabang, Pengurus Pusat mengambil keputusan mengenai pemberhentiannya.

**BAB II
ORGANISASI**

- Pasal 3 : 1. Muktamar dilaksanakan 3 tahun sekali oleh Pengurus Pusat bersama dengan Panitia Penyelenggara Muktamar.
2. Panitia Penyelenggara Muktamar bertanggungjawab atas segi teknis penyelenggaraan Muktamar.
3. Utusan cabang yang membawa mandat resmi mempunyai hak suara.
4. Sidang Pengesahan Kuorum, Sidang Pengesahan Acara, Sidang Pemilihan Pimpinan Muktamar dipimpin oleh Ketua Penyelenggara Muktamar.
5. Apabila Panitia Penyelenggara Muktamar dijabat oleh Pengurus Pusat, maka Sidang Pengesahan Kuorum, Sidang Pengesahan Acara, Sidang Pemilihan Pimpinan Muktamar dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat.
- Pasal 4 : 1. Pengurus Pusat dipilih oleh Muktamar untuk masa jabatan antar dua

Muktamar.

2. Pemilihan Pengurus Pusat dilaksanakan dalam satu paket yakni seorang Ketua Terpilih sekaligus menjabat Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang merupakan wakil cabang dan wakil organisasi protes yang terkait.
3. Pemilihan dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pencalonan dan tahap pemilihan
4. Yang dapat menjadi calon adalah anggota biasa.
5. Pada tahap pencalonan tidak dilakukan pemungutan suara.
6. Nama-nama calon Pengurus dipersiapkan oleh Dewan Penyantun sebelum Muktamar dengan meminta masukan dari Cabang.
7. Dewan Penyantun akan menyusun paket-paket kepengurusan untuk diajukan kepada Muktamar guna dipilih.
8. Paket yang mendapat suara terbanyak yang kemudian ditambah dengan Ketua Terpilih pada Muktamar yang lalu dan kini menjadi Ketua, menjadi Pengurus Perkumpulan untuk periode berikutnya.
9. Serah terima kepengurusan dari Pengurus Pusat yang lama kepada yang baru harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah Muktamar.

- Pasal 5 :
1. Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Pleno Pusat dan Pengurus Harian Pusat.
 2. Pengurus Pleno Pusat terdiri dari Ketua, Ketua Terpilih, merangkap Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
 3. Pengurus Harian Pusat terdiri dari Ketua, Ketua Terpilih merangkap Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 4. Rapat Pleno Pusat diadakan paling sedikit 8 bulan sekali dengan mengundang juga Anggota Dewan Penyantun.
 5. Rapat Pengurus Harian Pusat diadakan paling sedikit 3 bulan sekali.
 6. Pengurus Pleno Pusat mengawasi pelaksanaan dari keputusan keputusan Muktamar mengenai Organisasi maupun Perkumpulan.
 7. Pengurus Harian Pusat mengambil keputusan-keputusan dalam rangka pelaksanaan program perkumpulan yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada Muktamar.
 8. Untuk melaksanakan tugasnya, Pengurus Pleno Pusat dapat membentuk

badan-badan pelengkap serta badan-badan usaha yang dipertanggungjawabkan kepada Mukktamar.

9. Untuk melaksanakan program perkumpulan Pengurus Pleno Pusat dapat mengangkat karyawan pelaksana yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengurus Harian Pusat.

Pasal 6 : 1. Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang untuk masa jabatan tiga tahun, setidaknya-tidaknya Rapat Anggota Cabang memilih Ketua dan Sekretaris sebagai formatur.

2. Rapat Anggota diselenggarakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Mukktamar.

3. Formatur Pengurus Cabang harus menyusun Pengurus-pengurus Cabang lengkap paling lambat 30 hari setelah selesainya Rapat Anggota Cabang.

4. Serah terima kepengurusan dari Pengurus Cabang yang lama kepada Pengurus Cabang yang baru dilaksanakan paling lambat dalam waktu 40 hari setelah selesainya Rapat Anggota Cabang.

Pasal 7 : 1. Pengurus Cabang terdiri dari Pengurus Pleno Cabang dan Pengurus Harian Cabang.

2. Pengurus Pleno Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota-anggota.

3. Pengurus Harian Cabang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

4. Rapat Pengurus Pleno Cabang diadakan paling sedikit 8 bulan sekali.

5. Rapat Pengurus Harian Cabang diadakan paling sedikit 3 bulan sekali.

6. Pengurus Pleno Cabang memimpin kegiatan dan membina anggota Cabang dalam mengembangkan perkumpulan sesuai dengan keputusan-keputusan Mukktamar.

7. Pengurus Harian Cabang mengambil keputusan-keputusan dalam rangka pelaksanaan program perkumpulan di Cabang yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada Pengurus Pleno Cabang.

8. Untuk melaksanakan tugasnya, Pengurus Pleno Cabang dapat membentuk panitia-panitia sesuai dengan kebutuhan.

9. Untuk melaksanakan program perkumpulan di Cabang, Pengurus Pleno Pusat atas usul Pengurus Pleno Cabang dapat mengangkat karyawan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Harian Cabang.

- Pasal 8 : 1. Dewan Penyantun terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Anggota Dewan Penyantun sekurang-kurangnya terdiri dari 6 orang yang masing-masing membidangi KIE, Medis, Hukum, Pelatihan, Penelitian dan Program serta Anggaran.
3. Dewan Penyantun berwenang memberi nasehat diminta atau tidak diminta kepada Pengurus Pusat dalam menyelenggarakan program-program Perkumpulan pada umumnya.
4. Dewan Penyantun membantu Pengurus Pusat dalam menetapkan kebijakan serta menangani masalah dalam bidang KIE, Medis, Hukum, Pelatihan, Penelitian dan Program serta Anggaran.
5. Rapat Dewan Penyantun diadakan paling sedikit 3 bulan sekali.
6. Untuk melaksanakan kegiatan Dewan Penyantun, diperbantukan karyawan dari Pengurus Pusat.
- Pasal 9 : 1. Ketua Dewan Penyantun dipilih oleh Muktamar.
2. Ketua Dewan Penyantun melengkapkan susunan kepengurusannya selambat-lambatnya tiga bulan sesudah Muktamar.
3. Masa jabatan Dewan Penyantun antara dua Muktamar.

BAB III KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

- Pasal 10 : 1. Keputusan-keputusan dalam rapat Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan Dewan Penyantun diambil dengan jalan hikmah musyawarah untuk mufakat kecuali dalam keadaan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah suara yang hadir.
2. Pemungutan suara mengenai perorangan dilakukan secara tertulis bebas dan rahasia.

BAB IV KEKAYAAN

- Pasal 11 : 1. Uang pangkal ditetapkan Rp. 1.000,- untuk cabang.
2. Uang iuran ditetapkan Rp. 500,- per bulan.
3. Pengurus Cabang diwajibkan menyerahkan 10% dari hasil uang iuran yang diterimanya kepada pengurus Pusat.

4. Rapat Anggota Cabang dapat menetapkan uang iuran tambahan untuk kepentingan cabang masing-masing.

Pasal 12 : Perkumpulan mengembangkan usahanya antara lain dengan mendirikan Yayasan dan Badan Usaha lainnya yang tatakerjanya diatur oleh Pengurus Pusat.

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13 : Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam Muktamar atau dalam Rapat Kerja Tahunan bilamana disetujui oleh lebih dari 1/2 suara yang hadir.